
Prospek Mata Uang BRICS dan Korelasinya Terhadap Potensi Keamanan Ekonomi di Indonesia

Victor Ardian Sandi Braviano¹, Guruh Heriantomo²

^{1,2} Universitas Amikom Yogyakarta; Indonesia

correspondence e-mail*, victorardian@students.amikom.ac.id;

gheriantom07@students.amikom.ac.id

Submitted:

Revised: 2024/01/21

Accepted: 2024/01/21

Published: 2024/01/20

Abstract

This journal examines the potential of the BRICS currency, using the concept of neo-realism and conducting a comparative study on the condition of BRICS economic power. The author uses the Rational choice theory approach to explore the benefits for the BRICS policy to Indonesia, a developing country in the Asian region. The research primarily uses qualitative methods to analyze the process of international politics and the impact of the dollar's hegemony on the economic autonomy of developing countries. The study finds that the emergence of the BRICS currency not only provides a new alternative but also serves as an international preference for developing countries in their efforts to reduce dependence on the dollar. This dedollarization process is centered around the strength of China's renminbi (RMB) currency through the New Development Bank project. While the BRICS currency has not yet rivaled the dollar's hegemony, its implications aim to reduce the IMF's influence on international fund withdrawals, indirectly affecting Indonesia's economic security and regional political stability.

Keywords

United State's policy, BRICS, ASEAN Regional, Indonesia, Economic Security



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

BRICS merupakan akronim yang mengacu pada lima negara berkembang: Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. BRICS pernah membuat mata uang digital yang bernama BRICS Coin, namun pengaruh dan tingkat peredarannya masih terbilang rendah karena kekuatan mata uang tersebut yang masih belum dapat berkompetensi dan belum memenuhi tiga aspek standardisasi cadangan uang yang baik, antara lain segi keamanan, likuiditas, dan profit.¹

Latar belakang masalah keamanan perekonomian internasional pada negara-negara berkembang di Asia berakar pada kecurigaan negara-negara blok timur lewat sudut pandang sejarah mengenai sistem rekonsiliasi perekonomian dunia yang terjadi pascaperang dunia ke II

¹ Kentikelenis, A., Stubbs, T., & King, L. (2016). IMF conditionality and development policy space, 1985–2014. *Review of International Political Economy*, 23(4), 543–582. <https://doi.org/10.1080/09692290.2016.1174953>

yaitu Konferensi Bretton Woods yang dibentuk pada tahun 1944.² Perjanjian ini berisi tentang kesepakatan Amerika Serikat sebagai pencipta sistem tatanan ekonomi internasional baru, perjanjian tersebut dibentuk untuk menggantikan nilai tukar emas dengan mata uang dollar AS (1944) sebagai alat tukar utama dalam sistem keuangan dunia. Pemberhentian sistem Bretton Woods (1944 sampai 1972-1981) didasari atas terjadinya diskriminasi yang terjadi pada sistem Bretton Woods, dikarenakan munculnya rasa curiga negara-negara terhadap penumpukan stok emas milik Amerika Serikat yang tidak wajar.

Dengan adanya hal tersebut pada September 2006 negara-negara besar seperti China, Russia, Brazil dan India mengadakan pertemuan majelis umum PBB untuk memulai pembentukan BRICS dan KTT pertama kali diadakan Pada Juni 2009. Selama jangka waktu tersebut BRICS menjadi salah satu kubu kekuatan dunia untuk menyaingi Amerika Serikat dan NATO terutama pada tahun 2022 lalu saat Russia mengalami sanksi besar-besaran dari belahan dunia setelah penyerangan terhadap Ukraina BRICS memegang peranan penting untuk menjaga kestabilan perekonomian kenegaraan Russia hingga saat ini. BRICS adalah alternatif dari sanksi ekonomi atau kepada negara-negara yang tidak mampu membayar sebuah hutang dari negara lain atau organisasi internasional. BRICS menjadi alternatif permasalahan ekonomi bagi suatu negara dengan sistem yang baru dengan tidak bergantung pada dollar. Secara keamanan dan ketahanan Russia terbantu dengan BRICS yang memberi dana besar dan kestabilan ekonomi secara bertahap karena sumberdaya alam Russia bisa dibeli oleh negara anggota.

Kendati demikian, konsep ketahanan ekonomi nasional menurut (pakar) merujuk kepada beberapa aspek antara lain stabilitas politik, kestabilan sistem moneter domestik, ketersediaan sumber daya alam, kausalitas sumber daya manusia dan kebijakan ekonomi yang baik.³ Gabungan element penting tersebut dapat mempengaruhi tingkat potensial kemandirian suatu negara, ketika merujuk kepada Indonesia sebagai pokok pembahasan sekaligus objek parameter sebuah negara, secara geopolitik pembentukan infrastruktur perekonomian BRICS merujuk pada sistem moneter regional yang mana dijembatani dengan beberapa bentuk kebijakan negara dalam tingkat regional seperti ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) namun berbeda ketika pendekatannya dengan

² Williamson, J. (2009). Understanding special drawing rights (SDRs). Policy Briefs. <https://ideas.repec.org/p/iie/pbrief/pb09-11.html>

³ Ando, M. (2008). Economic Effects of an ASEAN + 6 Free Trade Agreement: A CGE Model Simulation Analysis. Asia Research Report 2007. Tokyo: Japan Center for Economic Research. Aslam, M. (2012). The Impact of ASEAN-China Free Trade Area Agreement on ASEAN's manufacturing Industry. International Journal of China Studies, Vol 3(1), pp. 43-78 Badan Pusat Statistik. (2013). Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Agustus 2013. Jakarta: BPS

BRICS, BRICS menggunakan sistem CRA (*Contingent Reserve Arrangement*) sebagai indikator dan kontrol likuiditas uang dalam lingkup bilateral di kawasan Asia Tenggara namun dalam pengimplementasiya, CRA perlu mengalami revisi dan juga pematenan dalam mempertahankan dan mengembangkan tingkat kredibilitasnya sebagai pendukung pengaturan sistem keamanan regional di kawasan Asia Tenggara.

METODE

Berdasarkan topik pembahasan pada jurnal, penulis menggunakan metode kualitatif dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif yang dikaji lewat pengumpulan data berdasarkan fenomena aktor negara dan dinamika politik melalui teknik deskriptif komparatif dengan paradigma post-positivistik (interpretatif) untuk menjabarkan data empiris dan memantik perspektif pembaca pada dinamika politik internasional yang berdampak pada pembentukan kebijakan negara. metode kualitatif membantu proses analisis dalam mendapatkan hasil yang komprehensif dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, dan buku yang kami kumpulkan secara Internet Based. metode ini mengkaji dampak dari fenomena potensi pembentukan mata uang baru BRICS dalam rangka mempengaruhi tingkat economic interest negara berkembang sebagai alternatif sistem keuangan regional yang dapat mempengaruhi kredibilitas dollar serta ketergantungan negara-negara berkembang dalam aspek sistem prekonomian internasional, dalam kepentingan ketahanan ekonomi, terdapat banyak elemen penting yang membangun aspek tersebut. Penulis mengkaji konteks ketahanan ekonomi lewat proses analisis pendekatan potensi keuntungan Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan bersama dengan rencana penyusunan mata uang BRICS dan bagaimana kebijakan ekonomi regional tersebut dapat memperkuat instrumen pembangunan infrastruktur negara dalam aspek perdagangan lintas negara dalam rasio Indonesia-Asean dan Indonesia-internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran New Development Bank (NDB) Sebagai Sistem Perangkat Keuangan BRICS.

Partisipasi China dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dan New Development Bank (NDB) telah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan Asia-Pasifik, khususnya Indonesia. BRICS adalah organisasi multilateral yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara anggotanya. Sebagai anggota

pendiri, China telah berpartisipasi aktif dalam upaya yang dipimpin BRICS untuk membiayai proyek infrastruktur di negara-negara berkembang. Pada tahun 2015, negara-negara BRICS membentuk NDB dengan memasukan investasi awal sebesar \$50 miliar dari negara-negara anggota. sebagai kerangka kerja dari BRICS sendiri, NDB fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS dan negara berkembang lainnya. Kontribusi China terhadap NDB sangat signifikan. China memegang 41% saham bank tersebut, menjadikannya pemegang saham terbesarnya, dengan rasio pengalokasian dana sebesar 30% ke Brazil, 14% ke Rusia, 28% ke India, 20% ke China dan 18% ke Afrika Selatan, pendanaan tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di setiap negara anggota, energi dan pengembangan kota. Sampai sekarang telah bergantung pada pinjaman dolar di pasar internasional dan pinjaman renmimbi dibesarkan di Cina. Sebelum akhir tahun 2021, NDB telah naik hingga \$44.25 Milyar masing-masing \$8 Milyar pada renmimbi.⁴ NDB juga menyetujui beberapa proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk kereta ekspres Jakarta-Bandung dan proyek perluasan Pelabuhan Cilacap. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara lain di kawasan. Proyek pembangunan infrastruktur andalan China, Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), juga berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Belt and Road bertujuan untuk menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika melalui jaringan jalan raya, kereta api, pelabuhan dan proyek infrastruktur lainnya. Di Indonesia, BRI telah membiayai beberapa proyek infrastruktur, antara lain kereta ekspres Jakarta-Bandung dan proyek pengembangan pelabuhan Patimban. Proyek-proyek ini telah meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara lain di kawasan.

Selain membiayai proyek infrastruktur, proyek ini juga memberikan bantuan teknis kepada Indonesia melalui program peningkatan kapasitas dan inisiatif berbagi pengetahuan. Misalnya, China menawarkan program pelatihan kepada pejabat Indonesia mengenai manajemen proyek dan perencanaan keuangan untuk proyek infrastruktur. Secara keseluruhan, keterlibatan China dalam BRICS dan NDB telah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia dan negara berkembang lainnya di kawasan Asia-Pasifik. Dana yang disediakan oleh organisasi-organisasi ini telah membantu membiayai proyek-proyek infrastruktur besar yang tidak

⁴ Ларионова, М. (2023). G20 at the critical juncture. Indonesia's 2022 presidency: internal and external shocks, risks of power rebalancing and eventual demise, causes of resilience and Re-Equilibrium. *International Organisations Research Journal*, 18(1), 33–74. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2023-01-02>

mungkin terwujud jika dilakukan oleh organisasi lain. Selain itu, program bantuan teknis China telah membantu lembaga-lembaga Indonesia membangun kapasitas untuk mengelola proyek-proyek ini secara efektif. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan konektivitas, meningkatkan perdagangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.⁵

Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur China terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara ASEAN, termasuk Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Melalui Belt and Road, China berupaya memperkuat infrastruktur dan hubungan perdagangan di seluruh Asia, termasuk ASEAN. Hal ini dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat stabilitas perekonomian daerah. Pengaruh politik dan keamanan: Faktor politik dan keamanan juga dapat berdampak pada keamanan ekonomi regional ASEAN. (Chia et al, 2004)

China memiliki kehadiran politik dan keamanan yang kuat di kawasan ini, dan hubungan politik yang baik dengan negara-negara ASEAN dapat berdampak pada stabilitas ekonomi kawasan. Kerja sama dalam kerangka BRICS juga dapat membantu memperkuat kerja sama dan pengaruh politik China di kawasan. Pengembangan Kelembagaan dan Standar: Melalui partisipasinya dalam BRICS dan kerja sama dengan ASEAN, China mempunyai potensi untuk berkontribusi terhadap pengembangan lembaga dan standar ekonomi regional (Ando et al, 2008). Hal ini termasuk memperkuat kapasitas kelembagaan ASEAN, menyelaraskan peraturan perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan standar keselamatan dan perlindungan konsumen. Disisi lain, BRICS telah mengembangkan sistem ekonomi digital yang berfokus pada keamanan siber, identitas digital, pembayaran digital, infrastruktur digital, dan tata kelola digital untuk menjamin keamanan ekonomi di Asia Tenggara dan Afrika. Di Indonesia, negara-negara pelopor utama seperti China dapat membantu meningkatkan infrastruktur digital, keamanan siber, identitas digital, pembayaran digital, dan tata kelola digital untuk meningkatkan keamanan ekonomi. Hal ini termasuk meningkatkan akses internet dan infrastruktur komputasi, memperkuat sistem keamanan siber untuk bisnis dan institusi, meningkatkan sistem identitas digital, meningkatkan sistem pembayaran digital, meningkatkan infrastruktur digital, dan

⁵ Bhattacharya A., Romani M. (2013) Meeting the Infrastructure Challenge: The Case for a New Development Bank. Presentation prepared for the G-24 Technical Group Meeting, 21 March. Available at: http://g24.org/wp-content/uploads/2014/03/Session-4_2.pdf (accessed 3 August 2016)

mengekang kejahatan di dunia maya, serta memperkuat tata kelola digital melalui undang-undang, kebijakan, dan peraturan untuk mencegah keamanan dan pelanggaran digital ruang cyber.

Infrastruktur Digital China melalui BRICS juga telah meningkatkan infrastruktur digital sebagai salah satu cara untuk mengembangkan mobilitas perdagangan dan perekonomian di Indonesia. Infrastruktur digital memungkinkan komunikasi antar negara secara cepat dan efisien, yang sangat membantu dalam perdagangan antar negara. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan China dalam infrastruktur digital, seperti melakukan koneksi internet lewat kabel optik transpacific (APC) dan kabel optik transpacific west (TW1). lalu kontribusi pengembangan inovasi instusional melalui BRICS juga telah meningkatkan kebijakan fiskal nasional sebagai salah satu cara untuk mengembangkan mobilitas perdagangan dan economic-interest di Indonesia. Kebijakan fiskal memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia, yang sangat membantu dalam perekonomian di Indonesia.⁶ Indonesia telah menjalin kerjasama dengan China dalam sektor kebijakan fiskal, seperti mengecilkan tarif import barang-barang dari China dan meningkatkan beban pajak barang-barang ekspor ke China. Pembelajaran Digital: China melalui Brics juga telah meningkatkan pembelajaran digital sebagai salah satu cara untuk mengembangkan mobilitas perdagangan dan perekonomian di Indonesia.

Pembelajaran digital memungkinkan pelajaran secara online, yang sangat membantu dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan China dalam pembelajaran digital, seperti melakukan pelajaran online melalui platform edtech (education technology). Digital Economic yang dibuat oleh China melalui BRICS akan memberikan lebih banyak peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan mobilitas perdagangan dan perekonomian di Indonesia. Hal ini akan memberikan lebih banyak peluang bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam inovasi perdagangan antar negara, serta memberikan lebih banyak peluang bagi masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari mobilitas perdagangan antar negara.

Kondisi ekonomi regional Asia Tenggara dalam dinamika politik Internasional

Letak geografis dan pengaruh polarisasi politik kontemporer internasional yang tengah terjadi memilik dampak terhadap stabilitas alur perdagangan bilateral antarnegara. Situasi kepentingan setiap negara yang bersifat anarkis di dalamnya sangat memengaruhi status

⁶ Burganova, I. N. (2022). Political aspects of the integration of the Silk Road Economic Belt and the Eurasian Economic Union projects for the Russian Federation. *Известия Саратовского Университета. Новая Серия*, 22(2), 226–231. <https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-2-226-231>

elektabilitas negara dalam menerapkan kebijakannya, khususnya terkait aspek kekuasaan dalam lingkup perdagangan lintas negara. Kondisi tersebut membuat negara-negara anggota BRICS untuk menciptakan strategi dengan meluncurkan mata uang baru sebagai pengganti dollar sebagai alternatif baru dalam sektor sentralisasi keuangan atas supremasi dollar. Sebagai dua negara besar yang tergabung dalam BRICS, Russia memiliki peran dalam menjaga keamanan ekonomi regional dan economic interest di kawasan Asia Pasifik, sedangkan Cina sebagai salah satu negara kuat mengembangkan pengaruhnya lewat ekspansi jalur perdagangan dan BRI serta memprakasai berjalanya dinamika aliansi organisasi internasional dalam lingkup regional.

BRICS menggandeng negara kawasan Asia Tenggara untuk melakukan kegiatan ekonomi mandiri dalam sektor regional guna menjaga stabilitas dan juga progresivitas perdagangan bebas di kawasan tersebut. Dilema situasi perekonomian internasional tersebut justru menjadi peluang bagi negara-negara berkembang, terlebih Indonesia dalam memaksimalkan perolehan keuntungan dalam dinamika ekspor dan juga ketahanan barang mentah sebagai salah satu negara produsen utama di kawasan Asia Tenggara. Namun, untuk meminimalisasi kerugian dalam pasar internasional, perusahaan domestik perlu mengembangkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas sektor produksi dan perdagangan domestic, Lewat kerjasama Pemerintah dan negosiasi kebijakan lewat China sebagai Regulator. Hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan manufaktur dan upaya dalam meminimalisasi dampak negatif seperti deindustrialisasi dan aktivitas pasar internasional

Dalam kasus pendanaan di Indonesia, sebagai contoh, terdapat dua institusi yang menyediakan pinjaman, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan New Development Bank (NDB). Kegagalan IMF dan keunggulan NDB dapat dilihat dari perbandingan beberapa hal seperti syarat dan Kondisi, IMF memerlukan syarat dan kondisi yang ketentaraan, seperti memerlukan reformasi ekonomi dan politik untuk menerima pinjaman. NDB tidak memerlukan syarat dan kondisi seperti yang diutustukan oleh IMF, kedua ada jumlah Pinjaman pinjaman yang diberikan oleh IMF biasanya lebih kecil dibandingkan pinjaman yang diberikan oleh NDB. Sebagai contoh, dalam kasus Indonesia, IMF menawarkan pinjaman sebesar \$3 milyar untuk membantu Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, sedangkan NDB menawarkan pinjaman sebesar \$1 milyar untuk contoh proyek pembangunan jaringan listrik di Sumatra. Pinjaman yang diberikan oleh IMF memiliki syarat waktu dan ketersediaan lebih kurang, seperti memerlukan pembayaran dalam waktu tertentu. NDB tidak memerlukan syarat waktu dan ketersediaan lebih kurang, Pinjaman

yang diberikan oleh IMF biasanya memiliki syarat untuk mengurangi defisit ekonomi dan mengurangi penggunaan tenaga listrik.

NDB tidak memerlukan syarat untuk mengurangi defisit ekonomi dan mengurangi penggunaan tenaga listrik. Lalu bagian stock atau ketersediaan yang diberikan oleh IMF secara penerapannya memiliki syarat untuk mengurangi penggunaan tenaga listrik dan mengurangi defisit ekonomi. NDB tidak memerlukan syarat untuk mengurangi penggunaan tenaga listrik dan mengurangi defisit ekonomi. Dari hal-hal tersebut, NDB menawarkan keunggulan dalam kasus pendanaan di Indonesia, seperti jumlah pinjaman yang lebih besar, tidak ada syarat waktu dan ketersediaan lebih kurang, tidak ada syarat untuk mengurangi defisit ekonomi dan mengurangi penggunaan tenaga listrik, serta tidak ada syarat lainnya yang menghalaukan kebijakan, justru memberikan dampak yang positif dalam membantu mengembangkan proses pembentukan struktur perekonomian Indonesia, dengan lebih efektif aman dan sustainable.

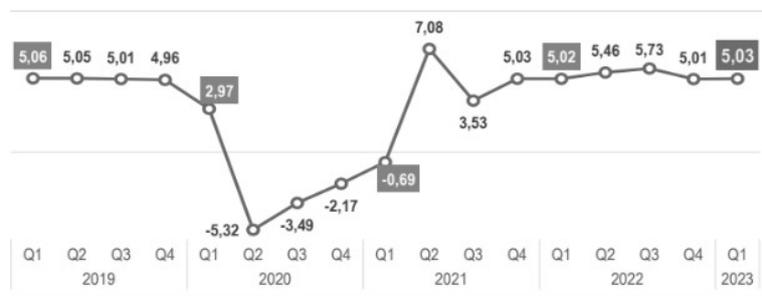
Faktor geopolitik dan pengaruh polarisasi dinamika pembentukan kebijakan multinasional di era kontemporer yang tengah terjadi memiliki dampak terhadap stabilitas alur perdagangan bilateral antarnegara. Situasi kepentingan setiap negara di dalamnya sangat memengaruhi status elektabilitas negara dalam menerapkan kebijakannya, terkhusus pada aspek kekuasaan dalam lingkup perdagangan lintas negara. Kondisi tersebut mendasari intensi negara-negara anggota BRICS dalam pembentukan strategi dengan cara meluncurkan mata uang baru sebagai alternatif pengganti dollar dalam sistem baru pada dimensi sektor sentralisasi mobilitas keuangan internasional atas supremasi kebijakan Amerika Serikat. Sebagai negara-negara yang tergabung dalam aliansi BRICS, peran negara dalam sistem politik, Brazil dan India dan Afrika Selatan didefinisikan sebagai negara demokrat, Rusia sebagai negara in-between berperan dalam menjaga keamanan ekonomi regional dan economic interest di kawasan regional, sedangkan Cina sebagai salah satu negara authoritarian mengembangkan pengaruhnya lewat ekspansi jalur perdagangan dan BRI serta memprakasai berjalanya dinamika aliansi organisasi internasional dalam lingkup regional. BRICS menggandeng negara kawasan Asia Tenggara untuk melakukan kegiatan ekonomi mandiri dalam sektor regional guna menjaga stabilitas dan juga progresivitas perdagangan bebas di kawasan tersebut.

Dilema situasi perekonomian internasional yang tengah terjadi menjadi titik balik peluang bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia yang dapat memaksimalkan perolehan keuntungan dalam aktivitas ekspor dan juga mempertahankan cadangan barang mentah dan sebagai salah satu pionir negara produsen natural-resources di kawasan Asia Tenggara. upaya

meminimalisir kerugian dalam pasar internasional diimplementasikan melalui peran perusahaan domestik dalam mengembangkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas sektor produksi dan perdagangan domestik, lewat kerjasama pemerintah dan negosiasi kebijakan lewat China sebagai Regulator. aktivitas tersebut dapat mempercepat proses perkembangan manufaktur dan upaya dalam meminimalisasi dampak negatif seperti deindustrialisasi dari aktivitas pasar internasional.

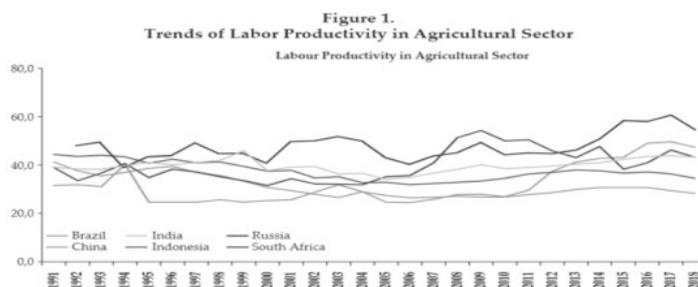
China dan BRICS : implikasi kebijakan dan stabilitas makro-ekonomi regional

Kebijakan yang ditawarkan Cina kepada negara-negara berkembang dan Indonesia dinilai lebih baik dalam penerapan kebijakan-kebijakannya mengenai pembebasan bea serta syarat nontarif kepada anggotanya (non zero sum game) dan bersifat simbiosis mutualisme, baik dari segi keuntungan maupun potensi perkembangan domestik di setiap negara-negara yang tergabung secara vice versa.

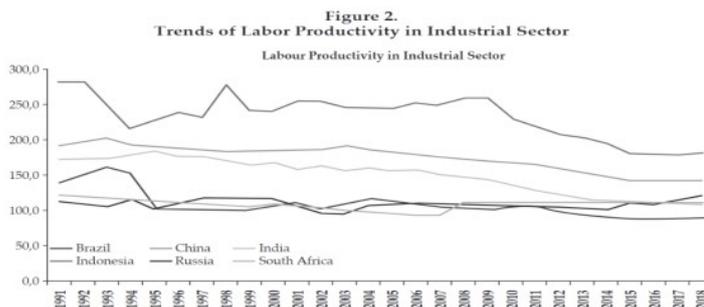


Grafik 1. Sumber: BPS Indonesia,(2023)

Dari statistik ekonometri di atas dapat disimpulkan bahwa data tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh pada kuartal 1 (2023) sebesar 5,03%. Hal tersebut ditandai dengan kondisi dinamika ekspor komoditas yang mencapai 67,2 miliar US dollar atau naik sebesar 1,6%. Secara kumulatif, ekspor komoditas Indonesia diisi oleh sumber daya alam seperti hasil logistik nonmigas, barang mentah, bijih besi, dan mineral seperti logam mulia. Mobilitas perdagangan bahan-bahan pokok didominasi oleh negara kawasan Asia Tenggara sebagai negara produsen utama serta kebutuhan komoditas lainnya seperti produk agraris dan Industrial.



Gambar 1. Sumber : Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan,(2020)



Gambar 2. Sumber : Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan,(2020)

Jika kita lihat pada tabel diatas, maka disimpulkan jika dibandingkan dengan negara-negara anggota BRICS Indonesia berada pada posisi yang cukup signifikan dalam hal keproduktivitan tenaga kerja di bidang pertanian. Kemudian berada di ke tiga posisi sebelum Brazil dan Afrika selatan, dan kemudian Rusia sebagai pemimpin peringkat paling atas pada keproduktivitan dalam sektor Industri. Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto (GVA) yang baik juga menunjukkan peningkatan kestabilisitan ekonomi di sebuah negara, karena pertumbuhan ekonomi akan membawa peningkatan investasi dan pendapatan per kapita, yang akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi dan memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik, sehingga mencegah perilaku masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas ilegal untuk menghasilkan penghasilan. Hal ini meningkatkan skala sosio-ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang.⁷

Peningkatan Gross Domestic Bruto (GDP) mencapai Rp 3,767 triliun (2021), meningkat 3,8% dalam kurun waktu satu tahun dari tahun sebelumnya, selain kenaikan dalam dimensi produktivitas ekonomi, kontribusi China lewat BRICS juga menjembatani kepentingan Indonesia dalam meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan tiang listrik dan

⁷ Rosyidin, M. (2023). Teori Hubungan Internasional: dari perspektif klasik sampai Non-Barat. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers. Penguatan hubungan ekonomi dan keuangan internasional dalam mendukung pembangunan nasional. (2012).

sarana telekomunikasi di daerah pedalaman Kalimantan Timur, pengembangan teknologi dan lahan pertanian serta penanggulangan potensi wabah dan bencana (COVID-19) di kawasan Kalimantan Selatan, Aceh Utara dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 (Bank Indonesia). China sebagai kontributor terbesar dalam berjalanya organisasi BRICS memperakasai pembentukan New Development Bank sebagai wadah penyaluran funding atau peminjaman dana kepada negara anggota yang memberikan dampak stabilitas dan kewanter moneter negara-negara dikawasan Asia Tenggara.

Visi dan misi BRICS dalam melepas rasa kebergantungan negara-negara miskin dan berkembang atas belunggu kebijakan dollar Amerika Serikat diprakarsai oleh kelima negara anggota BRICS yang memiliki andil besar dalam memberikan akses pendanaan kepada negara-negara kecil dengan persyaratan yang tidak semata-mata menguntungkan pihak penyedia pinjaman saja. Namun dalam implementasinya, pendanaan ini dikhususkan untuk program pemulihan pascakrisis dan bantuan pendanaan dalam rangka pembangunan infrastruktur mandiri kepada negara-negara dengan status ekonomi rendah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan moneter BRICS tersebut dinilai sangat menguntungkan pihak peminjam. Sementara itu, IMF berfokus dalam konteks pendanaan internasional atau Loans. IMF terdiri atas negara-negara superior dengan anggota-anggota primernya diisi oleh negara-negara yang memiliki sttus perekonomian kelas atas.⁸

Member	Quota (Millions, SDR)	Quota Share (%)	Votes	Vote Share (%)
United States	82994.2	17.46	831407	16.52
Japan	30820.5	6.48	309670	6.15
China	30482.9	6.41	306294	6.09
Germany	26634.4	5.6	267809	5.32
France	20155.1	4.24	203016	4.03
United Kingdom	20155.1	4.24	203016	4.03
Italy	15070	3.17	152165	3.02
India	13114.4	2.76	132609	2.64
Russian Federation	12903.7	2.71	130502	2.59
Brazil	11042	2.32	111885	2.22

Sumber: the Hindu. (2019)

Dari tabel di atas, tertera bahwa negara-negara yang berkontribusi sebagai depositor tertinggi didominasi oleh Amerika Serikat dengan total persentase sebesar (17.46%) yang kemudian diikuti oleh negara-negara bagian Uni Eropa, antara lain Jerman (5.6%), Perancis (4.24%), Inggris

⁸ Hadi, S. (2012). Indonesia, ASEAN, and the rise of China: Indonesia in the midst of East Asia's dynamics in the Post-Global Crisis world. *International Journal of China Studies*, 3(2), 151. <https://www.questia.com/library/journal/1P3-2871294901/indonesia-asean-and-the-rise-of-china-indonesia>

(4.24%) [Pre-Brexit(2020)], dan Italia (3.17%). Sisanya, diisi oleh anggota BRICS dan negara-negara berkembang sebagai kontributor kelas bawah di IMF. Kebijakan yang diberikan IMF kepada negara peminjam bersifat mengikat dan mewajibkan IMF sebagai penasihat keuangan negara peminjam. Dari aspek tersebut, IMF menerapkan konsep kapitalis yang sangat kuat, sehingga mengganggu kebijakan domestik dari negara yang dipinjaminya. Ketidaknyamanan yang muncul inilah yang mendasari ketidaksukaan negara anggota BRICS dengan regulasi serta peranan obligasi yang diterapkan oleh IMF. Kebijakan IMF dinilai sangat yang merugikan stabilitas hegemoni perekonomian negara-negara berkembang.⁹

Ironi peranan IMF sebagai pionir organisasi moneter internasional tersebut tercatat dari gagalnya peranan IMF dalam menerapkan peminjaman loans kepada negara miskin. Dalam responsinya, IMF tidak menanggapi akar permasalahan dari negara-negara terbelakang tersebut. Alih-alih membantu, IMF justru membebani kebijakan dalam negeri milik negara-negara miskin tersebut lewat kebijakannya yang dinilai mengganggu validitas hak dan juga kepentingan dari pihak peminjam. Dari hasil perbandingan antara IMF dan BRICS mengenai penerapan kebijakannya, dapat disimpulkan bahwasanya peran BRICS dinilai lebih relevan dan disukai oleh negara-negara berkembang terutama di kawasan ASEAN. Diferensiasi konsep kebijakan yang dibuat BRICS tidak mencampuri urusan kebijakan pihak peminjam dan memprioritaskan kemandirian negara peminjam dana yang dirujuk pada agenda pemulihan ekonomi pasca krisis, sesuai dengan kepentingan pembangunan infrastruktur nasional di masing-masing negara. Tapering adalah proses penurunan jumlah uang muka yang diambil oleh International Monetary Fund (IMF) melalui program bantuan dan pembiayaan. Proses ini dilakukan oleh negara maju pemasok Special Drawing Rights (SDR) terbesar, yaitu China, Jerman, dan Inggris, sejak tahun 2014 dan dijangka selesai pada tahun 2019. Tapering dilakukan karena IMF menilai bahwa ekonomi dunia sekarang cukup stabil dan memerlukan lebih sedikit bantuan dari organisasi ini.

Cara kerja Tapering dilakukan dengan mengurangi jumlah pembayaran dimuka yang dilakukan oleh negara-negara maju yang merupakan pemasok SDR terbesar. Negara-negara maju terbesar yang menawarkan SDR mengurangi uang muka mereka ke IMF setiap tahunnya, sehingga secara signifikan mengurangi jumlah uang muka yang tersedia untuk IMF. Hal ini akan meningkatkan independensi IMF dan memungkinkannya untuk lebih fokus pada program

⁹ Mazenda, A., & Newadi, R. (2016). The rise of BRICS development finance institutions: A comprehensive look into the New Development Bank and the Contingency Reserve Arrangement. *African East-Asian Affairs*, 0(3). <https://doi.org/10.7552/0-3-178>

reformasi dan stabilitas, termasuk program dukungan bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan lebih banyak dukungan dari IMF. Korelasinya dengan negara-negara maju dengan pemasok SDR terbesar adalah pendanaan akan berdampak pada negara-negara maju dengan pemasok SDR terbesar, karena akses mereka terhadap IMF akan berkurang. Hal ini akan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun juga akan menghemat biaya yang mahal dalam mencari bantuan dari IMF. Proses leverage ini juga memperbaiki struktur IMF, termasuk fokus yang lebih besar pada program reformasi dan stabilitas serta program dukungan dengan negara-negara berkembang dan membutuhkan lebih banyak dukungan dari IMF. Negara maju yang menjadi pemasok SDR terbesar yaitu China, Jerman, dan Inggris sangat stabil secara ekonomi dan tidak membutuhkan bantuan sebanyak dulu. Proses penyadapan ini akan berdampak besar bagi mereka karena akses mereka terhadap IMF akan berkurang. Hal ini tidak hanya menghemat biaya mahal yang terkait dengan akses terhadap bantuan IMF, namun juga jumlah uang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tapering juga berupaya memperbaiki struktur dan fungsi IMF, termasuk fokus yang lebih besar pada program reformasi dan stabilitas serta program dukungan bagi negara-negara yang sedang berkembang dan membutuhkan lebih banyak dukungan dari IMF. Hal ini akan meningkatkan peluang bagi negara-negara kurang berkembang untuk menerima dukungan yang efisien dan efektif dari IMF.

Dilema problematik ekonomi internasional mendasari urgensi BRICS dalam memberikan sebuah tawaran untuk menciptakan tatanan ekonomi kapitalis dalam lingkup ekonomi internasional yang baru.¹⁰ Di sisi lain, inflasi yang tengah melanda Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa karena adanya konflik perang Rusia dan Ukraina menyebabkan negara-negara berkembang turut terkena imbas. Keadaan dimanfaatkan menjadi peluang oleh The Fed, dengan menyongsong strategi utamanya yaitu dengan mempertahankan kredibilitasnya sebagai salah satu aksi yang empiris dilakukan dengan melakukan pengurangan intensitas pembelian aset obligasi atau Tapering, selain itu ada Special Drawing Rights (SDR) yang secara harifiah adalah unit akun yang digunakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai aset cadangan internasional. SDR diciptakan oleh IMF pada tahun 1969 sebagai respons terhadap kebutuhan akan aset cadangan yang lebih stabil dan dapat diterima secara internasional daripada mata uang tunggal.

¹⁰ Soesastro, H., & Basri, M. C. (2005). The political economy of trade policy in Indonesia. ASEAN Economic Bulletin, 22(1), 3–18. <https://doi.org/10.1355/ae22-1b>

Kewajiban untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian seperti revaluasi nilai tukar ketika tidak ada alternatif lain berarti bahwa para spekulasi harus mengeluarkan uang mereka sendiri dengan mengorbankan pembayar pajak, meskipun sejumlah besar uang dipertaruhkan. melihatnya berulang kali. Ini memperingatkan tentang fluktuasi nilai tukar. Inilah alasan utama mengapa C-20 tidak dapat menyepakati rancangan sistem moneter internasional yang baru. Tampaknya tidak ada alasan teknis mengapa dunia tidak boleh mengadopsi sistem seperti itu pada tahap ini, namun hal ini dapat berubah dengan diperkenalkannya nilai tukar mengambang, sehingga mengurangi peran angka SDR untuk mewakili nilai tukar referensi. Karena setiap negara tidak menetapkan nilai tukarnya sendiri dan mengetahui lebih banyak tentang nilai tukar, lebih banyak aspek, seperti kebijakan makroekonomi dan fiskal, menjadi hal yang mendasar.

Kebalikan dari kewajiban penyesuaian adalah pembagian manfaat hak kepemilikan, dimana negara menerima manfaat sesuai dengan alokasi IMF mereka. Jika negara-negara Asia mempertahankan target akumulasi cadangan yang tinggi dibandingkan dengan besarnya alokasi IMF, mereka perlu membeli atau meminjam sejumlah cadangan tambahan, namun beberapa cadangan perlu disesuaikan sesuai kebutuhan. Mungkin kekuatan tradisional IMF, khususnya negara-negara Eropa, akan mendapatkan keuntungan dari hak kepemilikan atas target akumulasi. Reformasi kuota IMF yang telah lama diusulkan akan mempersempit kesenjangan ini, namun tidak menghilangkannya, karena hal ini tidak akan memberikan manfaat bagi negara-negara di Asia Tenggara yang telah mencapai tujuan membangun cadangan devisa yang tinggi.

SDR sendiri bukanlah mata uang yang dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari, tetapi merupakan unit akun yang digunakan oleh IMF untuk memfasilitasi transaksi antara negara-negara anggota. Nilai SDR ditentukan oleh keranjang mata uang utama yang terdiri dari dolar AS (63.2 cents), Euro (41.0 euro cents), Jepang (18.4 yen), Inggris (9.03 pence); (John Williamson, 2009). Nilai SDR dihitung berdasarkan bobot yang ditetapkan untuk masing-masing mata uang dalam keranjang tersebut, dalam penerapannya SDR digunakan dalam beberapa fungsi, antara lain:

1. Aset Cadangan: Negara-negara anggota IMF dapat memegang SDR sebagai bagian dari cadangan internasional mereka. SDR dapat digunakan untuk memperkuat posisi cadangan negara dan memberikan stabilitas keuangan.
2. Transaksi IMF: SDR digunakan dalam transaksi antara IMF dan negara-negara anggota. IMF dapat memberikan pinjaman dalam SDR kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan keuangan.

3. Penilaian Mata Uang: SDR juga digunakan sebagai referensi untuk menilai nilai mata uang nasional. Beberapa negara menggunakan SDR sebagai acuan dalam penetapan nilai tukar mata uang mereka.

SDR memiliki peran penting dalam sistem keuangan global sebagai aset cadangan internasional yang dapat memberikan stabilitas dan likuiditas. Namun, penggunaan dan peran SDR masih terbatas dan tergantung pada kebijakan dan keputusan IMF serta negara-negara anggota, disisi lain secara periodik terdapat perdebatan mengenai pentingnya menciptakan aset besar yang pada prinsipnya akan dibebankan kepada negara-negara dengan kuota IMF yang besar dibandingkan negara-negara yang membutuhkan cadangan tambahan (negara-negara berkembang). Keistimewaan yang tidak biasa terkait dengan SDR dengan IMF mengacu pada posisi menguntungkan yang dinikmati oleh negara-negara industri seperti Amerika Serikat karena perekonomian mereka yang besar dan cadangan devisa yang tinggi. Negara-negara ini menerima alokasi yang sangat besar dari SDR yang baru diterbitkan, yaitu dana cadangan internasional tambahan yang dibuat oleh IMF. Alokasi ini memberikan cadangan tambahan yang dapat digunakan negara-negara tersebut untuk membiayai transaksi internasional atau memberikan pinjaman kepada negara anggota lain yang membutuhkan. Namun hak istimewa ini juga harus dibayar mahal oleh negara-negara berkembang. Hal tersebut menyebabkan BRICS bergerak menciptakan mata uang baru sebagai resolusi atas kesenjangan serta problematik yang dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang yang kebijakannya terbelenggu oleh hegemoni dollar Amerika Serikat. kondisi tersebut menjadi parameter utama BRICS mereformasi kebijakannya.

KESIMPULAN

Potensi pembentukan mata uang baru BRICS didasari atas pembentukan struktur ekonomi makro regional yang bersifat inovatif dan asimetris, dalam kasus pendanaan di Indonesia, sebagai contoh, terdapat dua institusi yang menyediakan pinjaman, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan New Development Bank (NDB). Kegagalan IMF dan keunggulan NDB dapat dilihat dari perbandingan beberapa aspek seperti syarat dan kondisi (*terms and conditions*), IMF memerlukan syarat dan kondisi yang ketentraan, seperti memerlukan reformasi ekonomi dan politik untuk menerima pinjaman. NDB tidak memerlukan syarat dan kondisi seperti yang diutustukan oleh IMF, kedua ada jumlah Pinjaman pinjaman yang diberikan oleh IMF biasanya lebih kecil dibandingkan pinjaman yang diberikan oleh NDB. Sebagai contoh, dalam kasus Indonesia, IMF menawarkan

pinjaman sebesar \$3 milyar untuk membantu Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, sedangkan NDB menawarkan pinjaman sebesar \$1 milyar untuk contoh proyek pembangunan jaringan listrik di Sumatra. Pinjaman yang diberikan oleh IMF memiliki syarat waktu dan ketersediaan lebih kurang, seperti memerlukan pembayaran dalam waktu tertentu. NDB tidak memerlukan syarat waktu dan ketersediaan lebih kurang, Pinjaman yang diberikan oleh IMF biasanya memiliki syarat untuk mengurangi defisit ekonomi dan mengurangi penggunaan tenaga listrik.

NDB tidak memerlukan syarat untuk mengurangi defisit ekonomi dan mengurangi penggunaan tenaga listrik. Lalu bagian stock atau ketersediaan yang diberikan oleh IMF secara penerapannya memiliki syarat untuk mengurangi penggunaan tenaga listrik dan mengurangi defisit ekonomi. NDB tidak memerlukan syarat untuk mengurangi penggunaan tenaga listrik dan mengurangi defisit ekonomi. Dari hal-hal tersebut, strategi BRICS dalam mengembangkan potensi mata uang baru dan dengan NDB sebagai kerangka kerja alternatif sistem perekonomian antar negara, menawarkan keunggulan dalam kasus pendanaan di Indonesia, seperti jumlah pinjaman yang lebih besar, tidak ada syarat waktu dan ketersediaan lebih kurang, tidak ada syarat untuk mengurangi defisit ekonomi dan mengurangi penggunaan tenaga listrik, serta tidak ada syarat lainnya yang menghalaukan kebijakan, justru memberikan dampak yang positif dalam membantu mengembangkan keamanan pembentukan struktur otonomi perekonomian Indonesia, dengan lebih efektif aman dan sustainable, selain itu perlu diikuti pemantauan dalam aspek pertumbuhan ekonomi mandiri dalam sektor fundamental seperti industri, kebijakan fiskal dan juga alokasi dana pembangunan nasional.

REFERENSI

- Ando, M. (2008). Economic Effects of an ASEAN + 6 Free Trade Agreement: A CGE Model Simulation Analysis. Asia Research Report 2007. Tokyo: Japan Center for Economic Research.
- Aslam, M. (2012). The Impact of ASEANChina Free Trade Area Agreement on ASEAN's manufacturing Industry. International Journal of China Studies, Vol 3(1), pp. 43-78
- Badan Pusat Statistik. (2013). Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Agustus 2013. Jakarta: BPS.
- Chia, S. Y. (2004). ASEAN-China Free Trade Area. Paper presented at the AEP Conference, 12-13 April 2004. Hongkong.

- Chen, I, T-Y., & Yang, A, H., 2013. "A harmonized Southeast Asia? Explanatory typologies of ASEAN countries' strategies to the rise of China", *The Pacific Review*, 26 (3), 265– 288. <https://doi.org/10.1080/09512748.2012.759260>
- Feridhanusetiawan, T., M. Pangestu. (2003). Indonesian Trade Liberalisation: Estimating the Gains. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 39 (1), pp. 51-74.
- Gingrich, .D., J.D. Garber. (2010). Trade Liberalization's Impact on Agriculture in Low Income Countries: a Comparison of El Salvador and Costa Rica. *The Journal of Developing Areas*, Vol 43 (2), pp. 1- 17.
- Haryadi. (2008). Dampak Liberalisasi Perdagangan Pertanian Terhadap Perekonomian Negara Maju dan Berkembang. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Hosny, A.S. (2013). Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature. *International Journal of Economy, Management and Social Sciences*, Vol 2(5), pp: 133-155.
- Engel, C. (2016). Exchange rates, interest rates, and the risk premium. *American Economic Review*, 106(2), 436-74.
- Fahmi, A. (2019). Pengaruh capital inflow, inflasi, suku bunga, ekspor, dan impor terhadap nilai tukar Rupiah. *KINERJA*, 16(1), 40-50.
- Goestjahjanti, F. S. (2018). Analysis competitiveness and exchange rate effect on Indonesian terms of trade 1995-2016. *Jurnal Manajemen*, 22(1), 91-103
- Kentikelenis, A., Stubbs, T., & King, L. (2016). IMF conditionality and development policy space, 1985–2014. *Review of International Political Economy*, 23(4), 543–582. <https://doi.org/10.1080/09692290.2016.1174953>
- Demir, E., & Ersan, O. (2017). Economic policy uncertainty and cash holdings: Evidence from BRIC countries. *Emerging Markets Review*, 33, 189–200. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.08.001>
- Williamson, J. (2009). Understanding special drawing rights (SDRs). *Policy Briefs*. <https://ideas.repec.org/p/iie/pbrief/pb09-11.html>
- Marchesi, S., & Sabani, L. (2007). IMF concern for reputation and conditional lending failure: Theory and empirics. *Journal of Development Economics*, 84(2), 640–666. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.01.001>
- Qin, Y. (2014). Continuity through Change: Background Knowledge and China's International Strategy. *The Chinese Journal of International Politics*, 7(3), 285–314. <https://doi.org/10.1093/cjip/pou034>
- Best, J. (2014). Governing failure - provisional expertise and the transformation of global development finance. https://doi.org/10.26530/oopen_472457

- Lagutna, M. (2019). BRICS in a world of regions. *Third World Thematics*, 4(6), 442–458. <https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1643781>
- Ларионова, М. (2023). G20 at the critical juncture. Indonesia's 2022 presidency: internal and external shocks, risks of power rebalancing and eventual demise, causes of resilience and Re-Equilibrium. *International Organisations Research Journal*, 18(1), 33–74. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2023-01-02>
- Bhattachara A., Romani M. (2013) Meeting the Infrastructure Challenge: The Case for a New Development Bank. Presentation prepared for the G-24 Technical Group Meeting, 21 March. Available at: http://g24.org/wp-content/uploads/2014/03/Session-4_2.pdf (accessed 3 August 2016)
- Burganova, I. N. (2022). Political aspects of the integration of the Silk Road Economic Belt and the Eurasian Economic Union projects for the Russian Federation. *Известия Саратовского Университета. Новая Серия*, 22(2), 226–231. <https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-2-226-231>
- Hadi, S. (2012). Indonesia, ASEAN, and the rise of China: Indonesia in the midst of East Asia's dynamics in the Post-Global Crisis world. *International Journal of China Studies*, 3(2), 151. <https://www.questia.com/library/journal/1P3-2871294901/indonesia-asean-and-the-rise-of-china-indonesia>
- Mazenda, A., & Newadi, R. (2016). The rise of BRICS development finance institutions: A comprehensive look into the New Development Bank and the Contingency Reserve Arrangement. *African East-Asian Affairs*, 0(3). <https://doi.org/10.7552/0-3-178>
- Soesastro, H., & Basri, M. C. (2005). The political economy of trade policy in Indonesia. *ASEAN Economic Bulletin*, 22(1), 3–18. <https://doi.org/10.1355/ae22-1b>
- Hadiwinata, B. S. (ca. 2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rosyidin, M. (2023). *Teori Hubungan Internasional: dari perspektif klasik sampai Non-Barat*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers. Penguatan hubungan ekonomi dan keuangan internasional dalam mendukung pembangunan nasional. (2012).